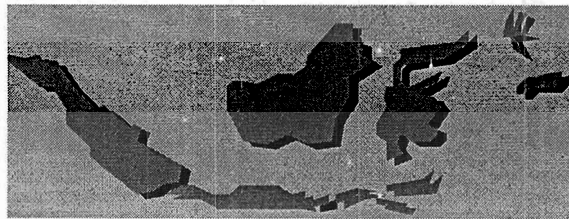


Kumpulan Makalah

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kerjasama Indiana University dan Universitas Negeri Padang
Period 2000-2005



✓

Panitia Pelaksana Kerjasama
Indiana University-Universitas Negeri Padang
November, 2004

Table of Contents

	page
I INTRODUCTION	
Lift Every Voice and Sing: Building Democracy through Dialogue (<i>Margaret Sutton</i>)	
II PROSPECT OF CIVIC EDUCATION	
Pendidikan Kritis (<i>Critical Pedagogy</i>): Teori dan Kemungkinan Aplikasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan (<i>Isnarmi Moeis</i>)	
Pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Masyarakat Majemuk (<i>Helmi Hasan</i>)	
Prospek Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah- sekolah Masa Datang di Indonesia (<i>Yulinar Nur</i>)	
Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Ungkapan Problematika dan Beberapa Catatan Upaya Perumusan Otonomi di Bidang Pendidikan (<i>Afriva Khaidir dan Suryanef</i>)	
Reorientasi Konsep Dasar Materi Ajar PPKn dalam Menghadapi Era Globalisasi (<i>Muhardi Hasan</i>)	
III TEACHERS DEVELOPMENT	
The Education of Social Studies Teachers at the School of Education, Indiana University (<i>Azwar Ananda</i>)	
Pengembangan Profesi Guru di Indiana dan Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia (<i>M. Fachri Adnan</i>)	
Perilaku Instruksional Guru Pendidikan Kewarganegaraan (<i>Yasril Yunus</i>)	

IV TEACHING STRATEGY OF CIVIC EDUCATION

Strategi Pengajaran Social Studies Pada Sekolah Menengah di Indiana, USA dan Kemungkinan Penerapannya terhadap Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah-sekolah di Indonesia (*Lili Nurlaili*)

Dimensi Keterampilan (Skills) dalam Pembelajaran Civic di Victoria, Australia (*Maria Montessori*)

Program Peer-Mediation: Upaya Dunia Pendidikan Mempersiapkan Generasi Anti Kekerasan dalam Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Multikultural di Amerika Serikat (*Afriva Khaidir*)

Model Penilaian Pendidikan Civic pada Sekolah-sekolah Menengah di Indiana, USA (*Syamsir*)

Civic Education in the Classroom: One School, Two Teachers, Successful Students (*Wendy Gaylord*)

V SPECIFIC ASPECT OF CIVIC EDUCATION

Peranan Pendidikan Hukum dalam Menuju Masyarakat Demokratis (*Sawir Karim*)

Pendidikan (Civic) Berspektif Gender: Strategi Mewujudkan Demokratisasi (*Fatmariza*)

Building a Better Indonesia through Environmental Education: The UNP Experience (*Mazzia Luth*)

Aktualisasi Pendidikan Civic dan Isu Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (*Syafnil Effendi*)

Penguatan Hak Asasi Manusia Dalam Civics Dan Civic Education in Indonesia (*Dasman Lanin*)

PENDIDIKAN KRITIS (CRITICAL PEDAGOGY)
Teori dan Kemungkinan Aplikasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Isnarmi Moeis

I. PENDAHULUAN

Banyak kritik yang menyatakan bahwa sebahagian besar kegagalan berdemokrasi dalam kehidupan bangsa Indonesia terkait dengan kegagalan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan warga negara yang demokratis. Tampaknya kritik ini beralasan dengan merujuk kepada pemikiran Dewey tokoh klasik dalam pendidikan demokratis di Amerika, yang (kira-kira) menyatakan bahwa : demokrasi adalah suatu proses yang diciptakan melalui pendidikan. Jadi jika proses pendidikan gagal dalam mendidik warga negara yang demokratis maka sulit diharapkan masyarakat demokratis akan tercipta.

Pendidikan Kewarganegaraan (di Indonesia) yang justru memiliki porsi besar untuk mendidik siswa menjadi warga negara demokratis, pada kenyataannya merupakan pendidikan yang mematkan upaya ke arah pendidikan demokratis (Sumantri, 1999, Suryadi, 1999; Wiranata, 2000). Hal ini disebabkan Pendidikan Kewarganegaraan telah terpaku sebagai pendidikan yang verbalistik, normatif, dan paket nilai-nilai.

Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan untuk merevisi berbagai kekurangan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Misalnya survey nasional (1999) yang dilakukan oleh CICED (*Center for Indonesian Civic Education*), menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan untuk perbaikan mutu Pendidikan Kewarganegaraan. Diantaranya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan semestinya menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai dan cita-cita demokratis yang dibutuhkan masyarakat sipil Indonesia.

Usaha perbaikan Pendidikan yang terbaru dan sedang dilakukan adalah mengembangkan kurikulum baru (*citizenship*) yang berbasis kompetensi yang saat ini sedang diuji cobakan di beberapa tempat. Salah satu kelebihan dari kurikulum ini adalah mengajar siswa dengan berbagai keterampilan partisipasi dalam proses demokrasi.

Di satu sisi kurikulum bergerak kearah usaha penyiapan siswa yang demokratis. Di sisi lain terdapat berbagai hambatan untuk pelaksanaannya. Satu diantaranya menyangkut pengetahuan dan keterampilan pendidik untuk bisa menerapkan kurikulum baru sesuai dengan harapan. Dengan jujur kita harus mengakui bahwa guru dan pendidikan keguruan belum dipersiapkan dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai pendidikan demokratis. Konsep demokrasi, selama ini, banyak dikenal sebagai konsep dalam politik praktis. Sementara pengertian demokrasi dalam konteks pendidikan merujuk kepada proses yang menuntut pengetahuan dan keterampilan melaksanakan proses itu sendiri.

Disamping kekurangan dalam pengetahuan dan keterampilan tentang pendidikan demokrasi, dari pihak pendidik juga tidak ada dorongan kuat untuk menciptakan inovasi baru disebabkan kurikulum yang bersifat terpusat (*sentralistik*). Hal ini telah membiasakan pendidik dengan penggunaan petunjuk teknis. Dengan petunjuk teknis guru berperan sebagai pelaksana sesuai dengan petunjuk yang ada.

Untuk menjawab tantangan yang dipaparkan di atas, makalah ini mencoba membahas satu konsep pendidikan yang bernuansa demokratis (*critical pedagogy*), dan kemudian mencoba mencari kemungkinan aplikasi konsep tersebut bagi pemecahan masalah pendidikan kewarganegaraan yang sedang dihadapi saat ini. Secara berturut-turut pembahasan ini akan mendiskusikan: 1) Konsep Pendidikan Kritis, dan 2) Refleksi untuk Kondisi Indonesia saat ini.

II. PENDIDIKAN KRITIS (CRITICAL PEDAGOGY)

Pendidikan kritis dan demokratis merupakan bentuk pendidikan yang diharapkan dapat dikembangkan saat ini di Indonesia. Kedua bentuk pendidikan ini mengutamakan proses pembentukan keterampilan siswa dalam berdemokrasi yang meliputi keterampilan: berpikir kritis,

kemampuan memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan partisipasi dalam proses demokrasi

Untuk membentuk kerampilan yang seperti itu Apple (1998) menggambarkan beberapa kondisi penting yang dibutuhkan untuk membangun iklim kelas yang demokratis antara lain:

1. Adanya alur ide yang terbuka untuk semua partisipan sehingga semua anggota kelas memiliki akses yang sama dalam memperoleh pengetahuan.
2. Keyakinan terhadap kapasitas individu dan kelompok untuk memecahkan masalah.
3. Selalu menerapkan refleksi kritis dan analitik untuk mengevaluasi ide, masalah, dan kebijakan.
4. Peduli dengan kepentingan orang lain dan kepentingan bersama.
5. Peduli dengan martabat dan hak orang lain dan golongan minoritas.
6. Adanya pemahaman bahwa demokrasi adalah seperangkat nilai yang harus dijalani dan dipakai sebagai bagian kehidupan.

Baik dalam pendidikan kritis maupun dalam pendidikan demokratis, kondisi tersebut merupakan prasyarat penting untuk mendidik siswa dalam berdemokrasi. Namun dalam hal tertentu ada sedikit perbedaan dalam kedua pendidikan itu. Pendidikan kritis (*critical pedagogy*) sangat memperhatikan konsep *power-disempower* dalam suatu kondisi. Kondisi *disempowerment* merupakan titik tolak permasalahan yang harus dicarikan solusinya dalam bentuk tindakan transformatif.

Salah satu tokoh pendidikan kritis, Freire (1998), mengajukan konsep pendidikan kritis berawal dari idenya untuk mengembangkan kesadaran warga negara. Freire melihat bahwa pendidikan yang ada merupakan pendidikan yang meletakkan siswa dalam posisi sebagai objek pendidikan: siswa adalah orang yang tidak paham apa-apa, dan guru adalah subjek yang bertanggung jawab untuk memberi pengetahuan kepada siswa berdasarkan keputusan guru tentang apa yang mesti diketahui dan yang tidak mesti diketahui. Ciri-ciri pendidikan yang seperti ini antara lain :

1. Guru orang yang mengajar dan siswa orang yang diajar;
2. guru mengetahui segala sesuatu , siswa tidak mengerti sama sekali;
3. Guru yang berfikir sedang siswa diminta untuk menerima apa yang dipikirkan guru;
4. Guru berbicara , siswa mendengar;
5. Guru mendisiplin, siswa orang yang didisiplin;
6. Guru menentukan pilihan untuk siswa, dan siswa tinggal mengikuti pilihan yang sudah ditetapkan;
7. Guru melakukan tindakan dan siswa hanya membayangkan tindakan guru itu dalam pikirannya;
8. Guru memilih isi program dan siswa mengadopsi isi tersebut tanpa persetujuan mereka;
9. Guru mencampuradukkan antara otoritas dengan otoritas profesional, yang mengakibatkan pengekan terhadap kebebasan siswa;
10. Guru adalah subjek proses belajar, sementara siswa adalah objeknya.

Konsep pendidikan yang seperti itu disebut juga oleh Freire sebagai "*banking concept*" dalam dunia pendidikan. Konsep ini mengimplikasikan siswa sebagai objek yang dikontrol, dan diarahkan sesuai dengan kemauan guru. Pendidikan ini menegaskan pendekatan pendidikan yang bersifat proses *inquiry* dan *discovery*.

Kontras dengan "*banking concept*" dalam pendidikan adalah pendidikan kritis. Dalam konsep ini pendidikan dipandang sebagai proses dimana siswa memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ini proses belajar terjadi dalam hubungan guru-murid yang bersifat saling membantu dan saling berkomunikasi. Dalam mengawali proses, guru diharapkan mampu menghadirkan pengetahuan dan fakta sebagai masalah yang akan dikaji, digali, dan diselesaikan (Freire, 1998; Brosio 2000).

Selain itu kekhasan pendidikan kritis adalah menekankan pengetahuan sebagai konstruk budaya (Mc Laren, 1998). Pengetahuan yang terbentuk dalam pikiran manusia berasal dari budaya, sejarah hidup, dan bahasa yang diinternalisasi menjadi bahagian kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal ini terkandung implikasi bahwa proses belajar berangkat dari analisa tentang keadaan-keadaan dalam lingkungan siswa dalam upaya menemukan masalah-masalah yang menghambat kemudian mencari solusi dan menentukan tindakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan kritis tujuan pendidikan adalah untuk membantu siswa menjadi orang yang kritis dan mampu mengambil tindakan transformatif untuk melakukan perubahan dalam kehidupan.

Dalam pendidikan kritis ada tiga bahagian proses belajar: Pertama, disebut *Pedagogical Negativism*, yaitu meragukan segala sesuatu dan mengidentifikasi bentuk-bentuk *power* yang menekan dalam proses kehidupan. Kedua, membuat *judgment* tentang bentuk tekanan dari *power* tersebut, dan mengkaji tentang bentuk-bentuk alternatif untuk menghilangkan tekanan. Terakhir melakukan *penegasan* terhadap proses solusi yang sudah dipilih.

Satu hal yang penting diingat bahwa makna pendidikan (*pedagogy*) lebih dari sekedar mengajar (*teaching*). Pendidikan menunjukkan suatu praktek yang mengintegrasikan tujuan, isi, dan rancangan kurikulum, strategi dan teknik mengajar, dan evaluasi. Semua menyatu dalam realita kelas. Ambil contoh belajar tentang *nilai keadilan*. Dalam perspektif kritis pendidikan tentang nilai tersebut *tidak* dimulai dari konsep keadilan, tetapi dimulai dari penemuan masalah tentang keadilan dan ketidakadilan yang terkait dengan konteks komunitas sosial yang ada di lingkungan siswa. Dari penemuan masalah tersebut, kesadaran siswa dibuka untuk memulai pemahaman tentang nilai keadilan. Kemudian diajak untuk memilah persoalan tentang keadilan dan berusaha mencari kemungkinan solusi. Akhirnya melakukan tindakan yang sesuai untuk merubah keadaan.

Dalam perspektif kritis, pendidikan adalah proses dialektika di dalam diri dan di antara persona. Karena itu setiap proses mendidik terjadi dalam dua alur: Guru memberdayakan (*empowering*) dirinya sendiri, dan sekaligus menyediakan kondisi yang memberdayakan siswa. Adalah suatu kewajaran proses pendidikan kritis dimulai dengan melihat sekeliling sebagai suatu hal kontradiktif, dan bahkan mungkin saling bertentangan satu sama lain. Dari posisi ini kesadaran akan perubahan, dorongan kreatif mencari solusi, dan usaha pemecahan akan muncul dalam diri seseorang.

Pada prinsipnya strategi dalam proses pendidikan kritis akan meliputi : *partnership*, dialog, komunikasi, dan refleksi. Guru dapat memulai proses dengan cara memfokuskannya pada pertanyaan tentang isu-isu sosial yang mungkin meliputi : kebijakan, budaya, dan praktek nyata dalam kehidupan. Dari sini pemikiran reflektif terus dikembangkan melalui saling berbagi (*mutual-sharing*) antara guru dan siswa, saling menghargai, dan saling berkomunikasi. Hal yang harus disadari bahwa dalam mengembangkan suatu pendidikan dalam perspektif kritis, iklim yang bersahabat, saling berbagi, dan saling menghormati merupakan prasyarat bisa berkembangnya budaya reflektif. Dari budaya reflektif muncul kesadaran perlu adanya perubahan.

III. REFLEKSI DAN APLIKASI BAGI PENDIDIK DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tampaknya untuk memulai refleksi ini ada baiknya kita mencoba menjawab pilihan pertanyaan seperti yang diajukan McLaren (1998) berikut ini: *apakah kita ingin sekolah kita menghasilkan siswa yang pasif, warga negara yang tidak mau mengambil resiko, atau kita ingin siswa yang mampu secara politis kewarganegaraan untuk berjuang memerangi ketidakadilan? Apakah kita ingin mengakomodasi siswa untuk mematuhi semua tatanan yang ada dan sekedar menjadi alat dari sistem atau kita ingin siswa yang merasa tidak nyaman dengan adanya eksploitasi manusia dalam masyarakat, adanya pelecehan kemanusiaan dalam komunitasnya, adanya penjajahan terhadap hak dan kedaulatan orang lain? Atau apakah kita tidak ingin menciptakan suatu kelas belajar yang punya ruang untuk kebebasan dan mengajak siswa menjadi agen perubahan dan membawa harapan baru?*

Rasanya dari hati nurani seorang pendidik yang benar, akan tumbuh kesadaran bahwa selama ini kita telah terpaksa untuk menjadi alat dari sebuah sistem yang menciptakan warga negara yang pasif, patuh tanpa syarat, dan tidak memiliki kepedulian sosial dan kemanusiaan sama sekali. Dalam bahasa lain kita telah ikut, selama ini, menciptakan warga negara yang tidak demokratis. Dari sini kita bertolak untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ada sesuatu masalah yang nampak dan kita harus berbuat sesuatu untuk merubah keadaan, sehingga kita tidak hanya melihat kesalahan tetapi berusaha merubah kesalahan. Di sinilah pendidikan kritis diperlukan untuk membuat semua warga negara berdaya memperbaiki keadaan yang ada (*self-empowerment* dan *social transformation*).

Pertanyaan yang berikutnya: *Dari mana kita mulai usaha ini?* Sebagai pendidik yang memulai untuk berkesadaran kritis, menurut saya, yang paling bisa kita lakukan adalah dari diri sendiri. Kemudian beranjak ke lingkungan yang berada dalam jangkauan kita.

Untuk diri sendiri kita harus berani mengakui bahwa ada sesuatu masalah yang berasal dari kita sehingga menyumbang pada masalah yang besar. Sebahagian masalah itu dapat dilihat: apakah kita punya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk mendidik dalam perspektif yang demokratis. Jujur kita akui bahwa berbicara tentang pendidikan yang demokrasi, pikiran kita masih diwarnai dengan konsep demokrasi yang sangat teoritis yang kaitannya kepada dunia politik praktis. Padahal demokrasi adalah sebuah proses yang dihayati dan dijalani oleh setiap individu sehingga menjadi bahagian hidupnya. Dewey (Brosio, 2000) menegaskan demokrasi adalah "*the complete act of thought*" suatu perilaku berfikir yang komplit.

Selain persoalan pengetahuan yang tidak memadai perlu juga disadari bahwa kita kekurangan *skill* untuk menjadi pendidik yang ideal. Kita selama ini terpaksa dengan petunjuk teknis dalam pengajaran dan tinggal melaksanakan kurikulum seperti dalam petunjuk teknis. Tanpa disadari pendidik telah diarahkan menjadi "tukang mengajar", bukan menjadi "profesional mengajar". Ironinya kita menerima ini sebagai anugerah karena tidak menuntut berfikir dan berkreatifitas banyak. Semua sudah disediakan.

Disebabkan oleh rutinitas pekerjaan yang sudah dipesan, kesadaran kritis sebagai pendidik menjadi tumpul. Bagaimana mungkin kita mendidik siswa berfikir kritis jika pendidik kehilangan kesadaran kritis.

IV. PENUTUP

Dari refleksi di atas dapat dilihat bahwa, paling sedikit dari sisi pendidik ada tiga kelemahan untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan yang ideal (sejalan dengan kurikulum baru yang sedang *dipilot-projekkan*), yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran.

Untuk mengatasi kelemahan ini disarankan agar: Pendidik membekali diri dengan pengetahuan tentang pendidikan kritis dan demokratis. Pendidikan kewarganegaraan yang akan dikembangkan di sekolah bukan lagi transformasi nilai. Tetapi pendidik menyadari bahwa nilai yang di pelajari siswa, adalah nilai yang tumbuh dalam konteks kemasyarakatan, dan kenegaraan

yang berkembang dan membentuk pola-pola dalam masyarakat. Pendidik yang paham tentang keterkaitan pendidikan dan demokrasi dalam masyarakat akan membantu siswa melihat keterkaitan nilai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan kemudian mencari solusi terhadap persoalan. Giroux (2000) menyarankan setidaknya tiga hal yang harus dimengerti seorang pendidik kritis dalam rangka menempatkan pendidikan sebagai bahagian untuk merubah tatanan masyarakat yang tidak demokratis menjadi demokratis.

Pertama, memahami bagaimana kekuasaan (*power*) dalam kehidupan sehari-hari telah membentuk pemahaman dan pengetahuan siswa dan juga guru tentang nilai-nilai yang ada. Pengetahuan dan pemahaman itu telah turut mendukung sistem yang tidak demokratis. Bertolak dari pemahaman ini, siswa dan guru bersama melihat bahwa banyak peristiwa yang mematikan demokrasi seperti ketidakadilan, eksploitasi dan sebagainya.

Kedua, pendidik kritis harus mampu menjadi pelaku intelektual yang bertanggung jawab mengambil tindakan pedagogis untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini sebagai pendidik dapat mengartikulasikan dan mempertemukan usaha-usaha perbaikan yang ada sebagai bahagian usaha bersama dalam menegakkan demokrasi dan keadilan bagi semua.

Ketiga, pendidik kritis mampu menciptakan untuk dirinya sendiri dan mendorong siswa memiliki kemampuan berbuat suatu tindakan nyata untuk merubah keadaan yang bermasalah.

Dari saran-saran di atas tampak bahwa pengetahuan tentang pendidikan kritis dan demokratis, merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan usaha nyata pendidikan untuk menciptakan suatu proses demokrasi di dalam kelas, dan usaha membuat tindakan perubahan terhadap hal-hal yang menghambat jalannya proses demokrasi.

Sejalan dengan itu mungkin rekomendasi berikut dapat menjadi pertimbangan untuk merubah praktek pengajaran ke arah proses yang sejalan dengan tuntutan demokrasi:

1. Untuk mengganti pengajaran yang indoktrinatif, guru dianjurkan mengganti strategi yang banyak melibatkan siswa.
2. Guru harus menjadi model yang mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan berbagai nilai, ketimbang memaksa siswa untuk meyakini hanya satu kebenaran.
3. Siswa haruslah diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat, ide, dan nilai mereka sendiri tanpa ada ancaman psikologis.
4. Guru harus mampu menyampaikan bahwa setiap manusia dapat berbuat kesalahan, dan orang lain memahami hal itu.
5. Kelas adalah tempat dimana siswa mengembangkan keterampilan meneliti dan menemukan secara ilmiah.
6. Siswa harus diberi kesempatan untuk berfikir kritis.
7. Kelas adalah wacana dimana siswa membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan mencari solusinya.
8. Hubungan guru-murid adalah kemitraan yang terus menerus diperbaharui melalui dialog terbuka. (diadaptasi dari Suparno, 2000, dalam *Majalah Basis*, bulan September)

Di atas semua rekomendasi itu, bahwa keinginan baik dan semangat adalah prasyarat utama untuk merubah keadaan yang ada. Semua kita para pendidik butuh memberdayakan diri sendiri untuk mau menyadari kekurangan, memperbaiki, dan melakukan tindakan perubahan. "saya belajar tentang kekurangan, saya berbuat mengatasi kekurangan, dan saya hidup dengan perubahan" itu lah mungkin motto yang tepat untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki perspektif kritis.

Daftar Bacaan

- Braine, J. A. and Michael Apple. 1995. "The case for democratic schools" dalam Apple and Braine (eds.) *Democratic Schools*. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Brosio, Richard. 2000. *Philosophical Scaffolding for the Construction of Critical Democratic Education*. New York: Peter Lang.
- Freire, Paulo, Ana Maria Araújo Freire and Donaldo P Macedo. 2000. *The Paulo Freire Reader*. New York: Continuum.
- Kanpol, Bary. 1993. "An educational challenge: Working thorough a **Philosophical** Contradiction." *Clearing House*. 66/4, p 241.
- Mc Laren, Peter. 1998. "Life in schools: An Introduction to Critical Pedagogy" dalam *The Foundation of Democracy*. New York: Peter Lang.
- Sumantri, Endang. 1999. "Community Civic Education: An Indonesian Case". *Paper* Center for Indonesian Civic Education, Bandung 16-17 Maret 1999.
- Suryadi, Ace 1999 "Civic Education toward Democratic Indonesian Society". *Paper* Center for Indonesian Civic Education, Bandung 16-17 Maret 1999.

Beberapa pertanyaan pokok untuk didiskusikan lebih lanjut:

1. Menurut pendapat anda, apakah sebenarnya yang menjadi penyebab kegagalan pendidikan demokrasi di Indonesia? Apakah anda setuju dengan pendapat penulis sebelumnya?
2. Carilah dan kemudian diskusikan berbagai pendapat dari para ahli pendidikan yang lain berkenaan dengan cara pembangunan suasana demokratis di kelas, kemudian simpulkan mana yang terbaik menurut anda.
3. Kemukakanlah keuntungan-keuntungan dan kelemahan (kalau ada) yang terdapat dalam penerapan pendidikan kritis di kelas.
4. Kemukakanlah proses yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan pendidikan kritis di kelas.